

Kinerja Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Semarang

Regional Economic Development Performance Of Semarang Regency

P. EKO PRASETYO

**Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
Gedung C6 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Tel. 024.8508015, e-mail prasetyo.dr.eko@gmail.com**

Diterima 7 September 2008; Disetujui 23 November 2008

Abstract : This study aims to find out regional economic performance as measured from the level of regional economic growth and its contribution to the people. This study utilizes sectoral economic growth theory, using sectoral industry agriculture and tourism as its bases that locally known as Intanpari. The growth and the performance of regional economic development of Semarang district are relatively better than those of other areas in Central Jawa province. Such a condition is achieved due to the vast number of intensive labor industries existing in the region and its sufficient natural resources (sufficient resource base). The development strategy in Semarang district, which is based on regional potentials (Intanpari) and on industry as the leading sector, is considered as successful. The performance of the regional economic development in this region has contributed to the prosperity level of its people with lower income gap distribution.

Keywords : Economic performance, economic growth, and income distribution

PENDAHULUAN

Diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999 yang kini telah diperbarui lagi dengan UU No.32/2004, telah banyak memberikan perubahan kebijakan dan pelaksanaan implementasinya di Indonesia. Berdasarkan UU tersebut, pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas dan utuh telah diaplikasikan pada tingkat Kabupaten dan Kota, sedangkan otonomi pada tingkat propinsi merupakan otonomi yang terbatas. Wujud nyata dari implementasi tersebut adalah bahwa pemerintah daerah Kabupaten atau Kota berhak penuh menetapkan skala prioritas pembangunan

daerahnya berdasarkan kemampuan lokal di daerah yang bersangkutan.

Dalam konteks pembangunan daerah maka visi, misi, tujuan, sasaran serta berbagai program pembangunan yang dimaksud ingin dicapai oleh daerah telah terkandung di dalam perencanaan strategik (renstra) bagi daerah yang bersangkutan. Selanjutnya renstra dapat menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja ekonomi daerah. Dengan demikian, pengukuran kinerja ekonomi daerah merupakan salah satu syarat yang perlu dilakukan guna mengetahui kualitas pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang telah direncanakan. Evaluasi kinerja ini

sebagai salah satu dasar untuk mengetahui lebih dini efisiensi dan efektifitas implementasi program yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengungkapan kinerja ekonomi daerah akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menuntun perbaikan demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Hal ini perlu dilakukan karena potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah sangat bervariasi.

Glasson dalam Rusli (2005) mengatakan bahwa kemakmuran suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonominya dan faktor ini merupakan faktor utama. Kinerja merupakan hasil dari struktur dan perilaku kebijakan yang diputuskannya. Jika struktur ekonomi baik dan kebijakan yang diputuskan benar maka kinerja ekonomi juga akan baik.

Seperti halnya strategi pembangunan daerah di Kabupaten Semarang, telah ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah yakni lebih menekankan pada sektor industri, pertanian dan pariwisata (Intanpari) sebagai potensi unggulan daerah tanpa mengabaikan kemampuan sektor lainnya. Tujuan penerapan strategi pembangunan daerah pada sektor Intanpari sebagai sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Semarang dimaksudkan agar sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Masalah pokok yang dihadapi oleh setiap negara dan daerah yang sedang membangun adalah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Ketiga masalah pokok ini saling terkait dan kompleks serta sulit untuk dipecahkan. Sedangkan, masalah umum dalam rangka menyediakan kebutuhan yang dihadapi secara nasional maupun regional adalah mencakup pilihan yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, distribusi dan pertumbuhan.

Dengan demikian, masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan, dengan menggunakan potensi sumber daya daerah yang dimilikinya. Pada saat ini, penekanan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Semarang telah difokuskan pada kemampuan sektor Intanpari. Walaupun pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Semarang dilihat dari PDRB nampak baik, tetapi masih dipertanyakan terjadinya pemerataan pembangunan antardaerah dalam proses pembangunan ekonomi.

Berbagai daerah di Indonesia mempunyai problematika tidak sama karena tergantung dari potensi pembangunan dan kondisi ekonomi-sosial budaya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan di atas, perlu diketahui dan dikaji lebih lanjut mengenai kinerja ekonomi daerah Kabupaten Semarang, pencapaian PDRB yang dihasilkan melalui kebijakan pengembangan potensi daerah Intanpari, dan potensi terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Penelitian ini bertujuan mengukur dan mengkaji kinerja ekonomi daerah Kabupaten Semarang yang tercermin pada kegiatan produksi pada sektor Intanpari, yang sangat berpengaruh terhadap PDRB dan distribusi pendapatan yang terjadi antardaerah. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai implementasi strategi pembangunan daerah berdasarkan pengembangan sektor unggulan Intanpari untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang lebih merata.

METODE

Pertumbuhan ekonomi regional. Aktivitas ekonomi wilayah dapat dibedakan atas sektor aktivitas basis (*basic sector*) dan sektor aktivitas non basis (*non-basic sector*). Aktivitas ekonomi sektor basis merupakan kegiatan yang berorientasi ekspor barang-barang dan jasa serta pelayanan lain ke luar wilayah perekonomian yang bersangkutan atau memasarkan barang-barang dan jasa kepada orang-orang yang datang dari

luar daerah perbatasan wilayah ekonominya. Sedangkan aktivitas ekonomi sektor non-basis merupakan kegiatan yang menyediakan barang-barang dan jasa hanya cukup untuk keperluan penduduk yang berada di dalam batas wilayah perekonomian sendiri.

Meningkatnya aktivitas ekonomi basis di suatu wilayah akan membentuk arus pendapatan ke wilayah tersebut. Selanjutnya, meningkatnya arus pendapatan tersebut akan meningkatkan pula permintaan akan barang-barang dan jasa pelayanan di wilayah tersebut yang dihasilkan oleh sektor nonbasis. Sebaliknya, menurunnya aktivitas sektor basis di suatu wilayah daerah akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir ke wilayah daerah tersebut dan akan mengurangi permintaan terhadap sektor non-basis. Oleh karena itu, sektor basis sering dijadikan sebagai sektor penggerak utama di setiap perubahan yang dikehendaki. Teori aktivitas ini sering disebut sebagai teori basis ekspor.

Teori pertumbuhan ekonomi regional berbasis ekspor menerangkan bahwa beberapa aktivitas ekonomi di suatu daerah adalah *basic*, dalam arti bahwa pertumbuhannya (PDRB dari sektor tersebut) menimbulkan dan menentukan pembangunan menyeluruh di daerah itu. Sedangkan, aktivitas lain (*non-basic*) merupakan konsekuensi dari pembangunan yang menyeluruh tersebut (Hoover, 1984; Bendavid-Val, 1991; Blair, 1991; Richardson, 2005). Menurut teori ini, semua pertumbuhan ekonomi regional lebih ditentukan oleh sektor basis sedangkan sektor nonbasis sebagai sektor pendukung dan pelayan sektor basis.

Teori basis ekonomi diperlukan untuk mengidentifikasi dan menentukan apakah suatu sektor atau industri merupakan sektor/industri basis/ekspor sebagai mesin pertumbuhan ekonomi atau tidak. Model ini digunakan setelah diukur dan diurai perubahan/pertumbuhan suatu variabel daerah (seperti employment, pendapatan, output, nilai tambah dan sebagainya) di setiap sektor/industri di suatu daerah selama kurun waktu tertentu dengan analisis *shift-share*. Inilah posisi teori basis ekspor, yakni kelanjutan dari analisis *shift-share* (Prasetyo, 2001). Karena

itulah analisis *shift-share* menjadi penting untuk mengetahui kinerja ekonomi suatu wilayah daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya, kajian tentang basis ekonomi regional umumnya untuk menemukan aktivitas-aktivitas ekspor di suatu daerah, untuk meramalkan pertumbuhan di aktivitas-aktivitas itu serta untuk mengevaluasi kinerja dan dampak dari kenaikan aktivitas ekspor atas aktivitas-aktivitas lain. Dalam teori pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor, perekonomian lokal harus mampu menambah aliran uang masuk agar tumbuh, dan satu-satunya cara yang efektif untuk menambah aliran uang masuk adalah menambah ekspor (Hoover, 1984; Blair, 1991). Para pendukung teori basis ekspor mengakui bahwa banyak bisnis melayani baik konsumen lokal maupun penduduk dari luar daerah. Oleh karena itu, kinerja ini diukur dengan analisis *location quotient* (LQ).

Kinerja pembangunan ekonomi. Pembangunan daerah adalah fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, *entrepreneurship*, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan pembangunan (Lincoln, 1999). Sedangkan tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Oleh karena itu, kinerja ekonomi pemerintah daerah dapat diketahui dari kemampuannya dalam mencapai tujuan tersebut.

Kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dianalisis peranannya dalam pembangunan nasional. Pembangunan wilayah berkaitan erat dengan pembangunan nasional karena pembangunan nasional mendorong pembangunan wilayah dan pembangunan wilayah memperkuat pembangunan nasional. Salah satu teori pertumbuhan wilayah yang paling sederhana adalah teori sektor. Teori ini dikembangkan berdasarkan hipotesis Clark Fisher yang mengemukakan bahwa kenaikan pendapatan perkapita akan dibarengi oleh penurunan proporsi sumberdaya yang digunakan dalam sektor pertanian (sektor primer) dan

kenaikan dalam sektor industri manufaktur (sektor sekunder) dan kemudian kenaikan dalam industri jasa (sektor tersier). Selanjutnya, pertumbuhan dalam sektor yang mengalami perubahan (sektor shift) dianggap sebagai sektor determinan utama dari perkembangan suatu wilayah yang bersangkutan.

Bertitik tolak pada hipotesis Kuznets, tahap awal dari suatu proses pembangunan nasional bahwa perbedaan dalam laju pertumbuhan regional yang besar antardaerah mengakibatkan kesenjangan dalam distribusi pendapatan antar daerah yang bersangkutan. Hal ini juga telah dialami oleh Indonesia di mana pembangunan di Indonesia bagian barat lebih tinggi daripada Indonesia bagian timur. Namun menurut Kuznets, dalam jangka panjang pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan (*maturity*) dan dengan asumsi mekanisme pasar bebas dan mobilitas semua faktor produksi antardaerah tanpa sedikitpun rintangan dan distorsi, maka perbedaan dalam laju pertumbuhan output antar propinsi cenderung mengecil bersamaan dengan tingkat pendapatan rata-rata per kapita (laju pertumbuhannya) yang semakin tinggi di setiap daerah, yang pada akhirnya menghilangkan kesenjangan ekonomi regional.

Indeks Williamson. Indeks ini digunakan untuk mengukur tendensi pemerataan pembangunan atau tingkat kesenjangan ekonomi antar-wilayah daerah yang bersangkutan. Semakin besar nilai indeks Williamson (mendekati satu), berarti semakin besar tingkat kesenjangan pendapatan antardaerah maka kinerja ekonomi daerah dinyatakan belum baik. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks Williamson (mendekati nol), berarti distribusi pendapatan semakin merata, maka kinerja ekonomi daerah dikatakan berhasil.

Dalam kajian ini akan digunakan pendekatan kriteria nilai indeks sebagai berikut : jika nilai indeks Williamson kurang dari 0,35 dianggap tingkat kesenjangan/ketimpangan rendah; jika nilai indeks Williamson diantara 0,35 – 0,50 dianggap terdapat ketimpangan sedang; dan jika indeks Williamson lebih besar daripada 0,50 dianggap telah terjadi ketimpangan tinggi. Secara

formulatif indeks Williamson ini dapat ditulis sebagai berikut :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 \times (f_i / n)}}{Y}$$

untuk $0 < V_w < 1$.

dimana :

V_w : nilai Indeks Williamson yang diharapkan.

Y_i : PDRB perkapita di tingkat Kecamatan (i) pada Kabupaten Semarang.

Y : PDRB perkapita di Kabupaten Semarang.

f_i : jumlah penduduk di masing-masing Kecamatan (i).

n : jumlah penduduk di Kabupaten Semarang.

Analisis Location Quotient (LQ). Analisis LQ merupakan suatu alat regional yang dapat digunakan dengan mudah, cepat dan tepat (Rahadjo, 2005). Analisis LQ dapat dihitung berulang kali dengan menggunakan berbagai variabel perubah acuan dan periode waktu. Kegunaan utama analisis LQ di antaranya adalah (Prasetyo, 1993, 2001; Bagdja, 2003) :

1. Untuk mengestimasi kapasitas ekspor, baik barang/jasa tenaga kerja yang terjadi di suatu wilayah dengan mudah dan murah, dibandingkan survei secara langsung.
2. Untuk melihat seberapa besar suatu sektor mampu memenuhi kebutuhannya sendiri (*self sufficient*).
3. Untuk melihat stabilitas perekonomian daerah secara keseluruhan yang dikaitkan dengan keragaman pada basis ekspor yaitu bahwa output/tenaga kerja tidak terkonsentrasi pada beberapa sektor/ industri saja.

Penggunaan analisis LQ merupakan metode statistik yang menggunakan karakteristik output atau nilai tambah atau kesempatan kerja untuk menganalisis dan menentukan keberagaman dari basis ekonomi (*economic base*) masyarakat lokal atau daerah. Perhitungan dengan analisis LQ dimaksudkan untuk mengidentifikasi komposisi pergeseran sektor-sektor basis di suatu wilayah/daerah dengan menggunakan data produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Perhitungan LQ secara matematik sebagai berikut (Bendavid, 1991) :

$$LQ_i = \frac{\frac{X_r}{RV_r}}{\frac{X_n}{RV_n}} \quad \text{atau} \quad LQ_i = \frac{\frac{X_r}{RV_r}}{\frac{X_n}{RV_n}}$$

dimana:

LQ_i : besarnya nilai location quotient sektor i di wilayah Kabupaten Semarang.

X_r : total employment atau nilai tambah dari suatu sektor i di daerah/kabupaten.

X_n : total employment atau nilai tambah dari seluruh sektor i di propinsi/nasional.

V_r : besarnya nilai variabel PDRB di daerah regional (Kabupaten Semarang)

V_n : besarnya nilai variabel PDRB di wilayah nasional (Propinsi Jawa Tengah).

Ketentuannya jika:

- $LQ > 1$ merupakan sektor basis, artinya; tingkat spesialisasinya regional (Kabupaten Semarang) lebih tinggi daripada tingkat nasional (Propinsi Jawa Tengah).
- $LQ < 1$ merupakan sektor non-basis, artinya; tingkat spesialisasinya regional (Kabupaten Semarang) lebih rendah daripada tingkat nasional (Propinsi Jawa Tengah).
- $LQ = 1$ adalah netral, artinya tingkat spesialisasinya tingkat regional (Kabupaten Semarang) sama dengan tingkat nasional (Propinsi Jawa Tengah).

Model Shift Share (SS). Model *shift-share* (SS) merupakan teknik untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah (kabupaten) dibandingkan dengan perekonomian wilayah yang lebih luas (propinsi). Tujuan model SS adalah untuk menentukan kinerja ekonomi daerah atau produktivitas kerja perekonomian daerah dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas sebagai referensinya. Dengan analisis ini akan diketahui kinerja perekonomian ke dalam tiga bidang yang berhubungan satu sama lainnya, yaitu pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) daerah yang diukur, pergeseran proporsional (*proportional shift*) yang mengukur secara relatif tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dengan wilayah daerah yang lebih luas, dan pergeseran differensial (*differential shift*) yang akan menentukan seberapa besar tingkat daya saing sektoral suatu daerah dibandingkan dengan

perekonomian yang lebih luas yang dijadikan sebagai acuan.

Model SS diawali dengan perubahan nilai tambah atau PDRB suatu sektor (i) di Kabupaten Semarang antar dua periode, yaitu periode dasar (0) dan periode (t). Dalam kajian ini sektor (i) adalah dikhususkan pada sektor Intanpari (1-3 sektor utama). Sedangkan sektor (j) adalah semua sektor (1-9 sektor) di Kabupaten Semarang dan di Propinsi Jawa Tengah. Metode ini digunakan dengan asumsi bahwa penerapan kebijakan pemerintah Kabupaten Semarang telah memfokuskan diri pada tiga sektor unggulan tersebut. Selain itu, diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut dipengaruhi oleh tiga komponen utama yakni *national growth component*, *industrial mix component*, dan *competitive effect component*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pergeseran pangsa regional di Kabupaten Semarang dengan menggunakan model analisis SS dapat diformulasikan dalam formula di bawah ini.

$$\Delta Q'_{ij} = Q^0_{ij} \left\{ \frac{Y_t}{Y_0} - 1 \right\} + Q^0_{ij} \left\{ \frac{Q'_i}{Q^0_i} - \frac{Y_t}{Y_0} \right\} + Q_{ij} \left\{ \frac{Q'_{ij}}{Q^0_{ij}} - \frac{Q'_i}{Q^0_i} \right\}$$

$$\Delta Q'_{ij} = PR_{ij} + PS_{ij} + DS_{ij}$$

karena:

$$Q'_{ij} = Q^0_{ij} + \Delta Q'_{ij} \text{ atau dapat}$$

$$\text{ditulis } \Delta Q'_{ij} = Q'_{ij} - Q^0_{ij}$$

$$\text{maka: } PR_{ij} = Q^0_{ij} \left\{ \frac{Y_t}{Y_0} - 1 \right\} \text{ Pangsa regional}$$

(*national growth component*)

$$PS_{ij} = Q^0_{ij} \left\{ \frac{Q'_i}{Q^0_i} - \frac{Y_t}{Y_0} \right\} \text{ Pergeseran proporsional}$$

sektoral (*industry mix component*)

$$DS_{ij} = Q^0_{ij} \left\{ \frac{Q'_{ij}}{Q^0_{ij}} - \frac{Q'_i}{Q^0_i} \right\} \text{ Pergeseran daya saing}$$

daerah (*competitive effect component*)

di mana:

Y_0 dan Y_t : PDRB Jawa Tengah masing-masing pada tahun dasar dan periode t.

Q^0_{ij} dan Q'_{ij} : PDRB dari sektor (i) regional di Kabupaten Semarang masing-masing pada tahun dasar dan periode t.

Q_i^0 dan Q_i^t : PDRB dari sektor (i) nasional di Propinsi Jawa Tengah masing-masing pada tahun dasar dan periode t.

Model Klasen Typology. Untuk memperoleh gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Semarang digunakan model *Klasen Typology*, (Sjafrizal, 1997). Melalui model ini akan diperoleh empat klasifikasi daerah di Kabupaten Semarang yang masing-masing memiliki karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda yaitu :

1. daerah bertumbuh cepat (*rapid growth region*).
2. daerah sedang bertumbuh (*growing region*).
3. daerah tertekan (*retarded region*).
4. daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*).

Adapun untuk mengetahui pola pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi agar klasifikasi pola daerah lebih representatif, digunakan data PDRB non industri. Jika dikatakan daerah maju dan tumbuh cepat, maka daerah-daerah ini harus mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari rata-rata Kabupaten Semarang dan atau Propinsi Jawa Tengah, dan seterusnya untuk daerah sedang berkembang, daerah maju tapi tertekan, serta daerah yang relatif tertinggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Perekonomi Daerah. Perlu dimengerti bahwa nilai PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi sangat diperlukan sebagai salah satu ukuran kinerja ekonomi suatu daerah yang bersangkutan. Untuk mengetahui tingkat kinerja ekonomi daerah tidak cukup hanya dilihat dari perkembangan nilai PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan saja, tetapi perlu dilihat dari laju inflasi daerah, tingkat pendapatan perkapita dan tingkat distribusi pendapatan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan menggunakan angka-angka PDRB, dan laju inflasi pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa selama periode waktu tahun 2000 hingga tahun 2005, kinerja ekonomi daerah Kabupaten Semarang nampak menunjukkan kecenderungan yang menurun. Sedangkan kinerja ekonomi daerah Kabupaten Semarang jika dilihat dari perkembangan PDRB per kapita pada Tabel 2, menunjukkan kecenderungan sedikit meningkat. Artinya kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Semarang secara nominal menunjukkan ada kecenderungan meningkat. Namun, jika secara riil dikaitkan dengan laju inflasi masih ada kecenderungan kinerja ekonomi daerah yang menurun. Dengan demikian maka pemerintah daerah hendaknya harus berupaya menekan laju

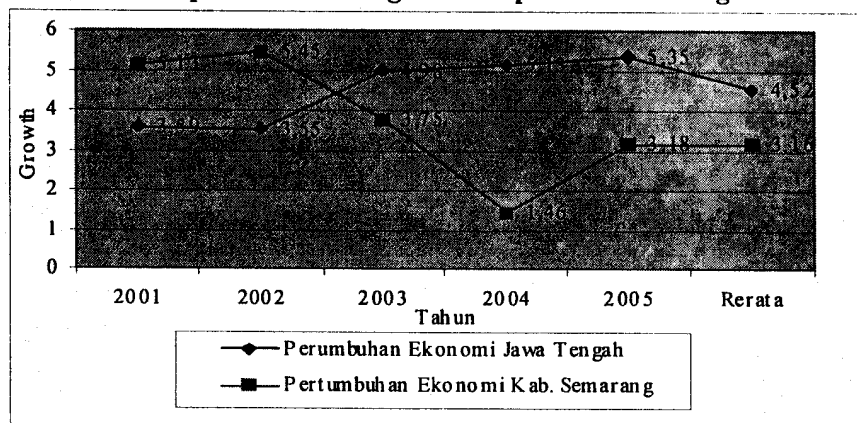
Tabel 1
Perkembangan PDRB Kabupaten Semarang Terhadap PDRB Jateng
Menurut Harga Konstan Tahun 2000 (Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB Propinsi Jawa Tengah		PDRB Kabupaten Semarang			Inflasi Kab. Semarang
	Nilai	Growth	Nilai	% dr Jateng	Growth	
2000	114.701.304,81	-	3.724.285,47	3,25	-	
2001	118.816.400,29	3,59	3.915.169,47	3,29	5,13	11,51
2002	123.038.541,13	3,55	4.128.481,21	3,36	5,45	10,02
2003	129.166.462,45	4,98	4.283.284,51	3,32	3,75	7,59
2004	135.789.872,31	5,13	4.345.991,15	3,20	1,46	6,12
2005	143.051.213,88	5,35	4.484.189,54	3,13	3,18	17
Rata-rata	127.427.299,73	4,52	4.146.900,22	3,25	3,16	10,45

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2006 (diolah)

inflasi agar kinerja ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih nyata.

Gambar 1
Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Kabupaten Semarang dan Propinsi Jawa Tengah

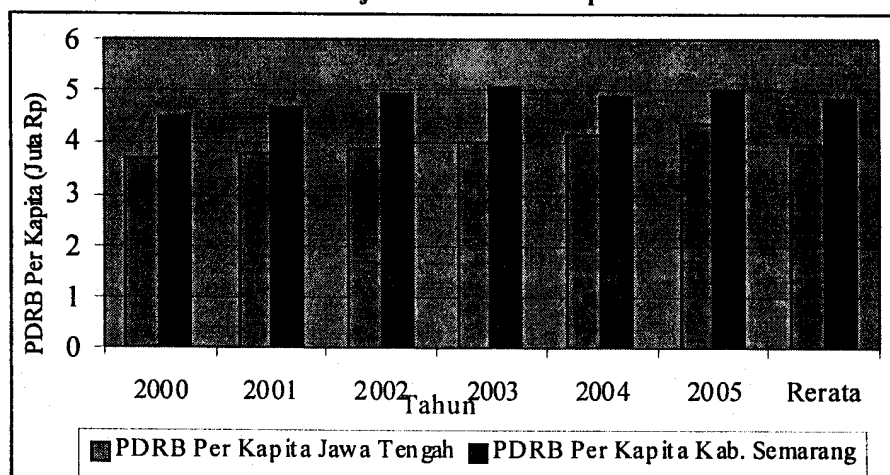


Tabel 2
PDRB Per Kapita atas Harga Konstan Tahun 2000

Tahun	Jawa Tengah		Kabupaten Semarang		Distribusi Pendapatan (Indeks Williamson)
	PDRB Per Kapita	Jumlah Penduduk	PDB Per Kapita	Jumlah. Penduduk	
2000	3.673.603,99	31.223.100	4.469.783	833.214	0,0354
2001	3.762.298,62	31.580.800	4.681.347	836.334	0,0398
2002	3.851.152,36	31.948.500	4.917.716	839.512	0,0449
2003	3.998.119,98	32.306.800	5.083.130	842.647	0,0438
2004	4.155.759,96	32.675.100	4.891.765	888.430	0,0292
2005	4.328.693,93	33.047.200	5.017.146	893.773	0,0262
Rata-rata	3.961.604,81	32.130.250	4.843.481	855.650	0,0366

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2006 (diolah).

Gambar 2
Kinerja PDRB Per Kapita



Kinerja ekonomi daerah Kabupaten Semarang jika dilihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi selama periode tahun 2000 hingga 2005 menunjukkan kinerja ekonomi yang menurun dibandingkan kinerja yang sama pada Propinsi Jawa Tengah. Artinya kapasitas pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu cerminan dari kesempatan kerja di daerah yang bersangkutan menunjukkan kecenderungan yang menurun dibanding kesempatan kerja secara (nasional) di Propinsi Jawa Tengah. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Semarang ke depan dapat lebih baik lagi.

Kondisi kinerja ekonomi daerah jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PDRB saja tidaklah cukup, maka perlu dilihat kembali dari segi pendistribusian PDRB tersebut kepada masyarakat. Apabila terjadi ketimpangan dalam distribusi pendapatan, maka kondisi kinerja ekonomi daerah dari segi ini dikatakan tidak baik. Sebaliknya, jika tidak terjadi ketimpangan dalam distribusi pendapatan, maka kinerja perekonomian daerah tersebut dikatakan baik. Untuk melihat kondisi ketimpangan ini digunakan perbandingan antar periode (Tabel 2) dan distribusi pendapatan terhadap wilayah daerah yang lebih kecil (Tabel 3 dan Tabel 4)

Tabel 3
PDRB Per Kapita dan Distribusi Pendapatan Per Kecamatan
di Kabupaten Semarang (dengan sektor industri)

Daerah Kec.	1999		2000		2001		2002		2003	
	Nilai	Vw	Nilai	Vw	Nilai	Vw	Nilai	Vw	Nilai	Vw
Getasan	2.082,5	0,066	2.245,8	0,062	2.513,7	0,063	2.833,5	0,063	3.017,8	0,067
Tengaran	2.162,4	0,066	269,9	0,238	2.567,6	0,066	2.895,8	0,066	3.168,7	0,065
Susukan	1.921,7	0,104	2.319,5	0,071	2.532,0	0,077	2.862,2	0,059	3.165,6	0,057
Kaliwungu	*	*	*	*	*	*	*	*	2.828,1	0,060
Suruh	1.790,3	0,108	2.091,0	0,086	2.297,1	0,090	2.615,8	0,087	2.794,8	0,091
Pabelan	2.909,3	0,001	3.274,2	0,014	3.699,8	0,015	4.187,0	0,016	4.529,9	0,015
Tuntang	2.124,7	0,067	2.175,6	0,074	2.460,9	0,073	2.781,2	0,072	2.998,5	0,074
Bayubiru	1.910,5	0,067	2.210,1	0,059	2.428,8	0,062	2.754,2	0,061	921,9	0,165
Jambu	1.884,1	0,080	2.138,6	0,066	2.393,1	0,067	2.691,1	0,067	892,2	0,174
Sumowono	2.207,1	0,047	2.567,8	0,030	2.788,2	0,036	3.161,9	0,034	3.344,3	0,039
Ambarawa	2.199,3	0,078	2.410,9	0,068	2.720,0	0,067	3.080,7	0,064	3.373,7	0,063
Bawen	2.894,4	0,002	2.676,9	0,033	3.016,1	0,033	3.374,2	0,034	3.684,4	0,033
Bringin	1.667,5	0,118	1.899,2	0,102	2.144,9	0,101	2.433,0	0,080	2.806,5	0,073
Bancak	**	**	**	**	**	**	**	**	2.320,8	0,072
Pringapus	4.373,6	0,108	4.186,0	0,082	4.733,9	0,083	5.300,7	0,083	5.920,0	0,090
Bergas	7.083,9	0,339	6.800,0	0,299	7.719,4	0,305	8.509,6	0,296	9.387,6	0,302
Ungaran	5.556,6	0,317	6.056,1	0,241	5.748,6	0,247	6.440,5	0,245	7.144,2	0,255
Rata-rata	2.672,9	0,098	2.282,6	0,080	3.110,3	0,087	3.321,3	0,083	3.244,4	0,099

Sumber: Dani, 2005 (diolah kembali)

Ket: *) Masih tergabung dengan Kecamatan Susukan

**) Masih tergabung dengan Kecamatan Bringin

Pada Tabel 2, nilai Indeks Williamson menunjukkan nilai yang hampir mendekati nol dengan rata-rata indeks 0,0366 dan ada kecenderungan nilai indeks tersebut menurun dari tahun 2000 hingga 2005. Artinya berdasarkan nilai indeks Williamson tersebut dapat dikatakan tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Semarang, yang berarti kinerja ekonomi daerah ini selama periode tahun 2000 hingga tahun 2005 dikatakan baik.

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4, nampak bahwa distribusi pendapatan masing-masing kecamatan di Kabupaten Semarang secara umum merata karena hampir semua nilai Indeks

Williamson (Vw) mendekati angka nol, atau masih di bawah angka 0,35. Apabila hanya berdasarkan Tabel 3 di mana masih menghitung PDRB dari sektor industri maka nampak terdapat dua kecamatan yakni Kecamatan Bergas dan Kecamatan Ungaran ada sedikit kecenderungan akan mengalami ketimpangan sedang, karena nilai Vw hampir mendekati nilai 0,035 – 0,050. Namun demikian, secara umum selama periode tahun 1999 hingga tahun 2003 dapat dikatakan tidak terjadi ketimpangan. Artinya, kinerja ekonomi daerah dari segi distribusi pendapatan dapat dikatakan baik. Jika dilihat dari Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4, kondisi perekonomian juga tidak mengalami ketimpangan dalam distribusi

Tabel 4
PDRB Per Kapita dan Distribusi Pendapatan Per Kecamatan
di Kabupaten Semarang (tanpa sektor industri)

Daerah Kec.	1999		2000		2001		2002		2003	
	Nilai	Vw	Nilai	Vw	Nilai	Vw	Nilai	Vw	Nilai	Vw
Getasan	1.827,6	0,033	1.975,2	0,036	2.200,4	0,038	2.486,0	0,036	2.635,0	0,033
Tengaran	1.556,3	0,007	1.638,5	0,011	1.830,3	0,008	2.083,6	0,025	2.264,6	0,004
Susukan	1.545,1	0,011	2.022,5	0,057	2.005,0	0,019	2.272,7	0,018	2.418,9	0,015
Kaliwungu	*	*	*	*	*	*	*	*	2.318,6	0,015
Suruh	1.449,0	0,027	1.699,5	0,001	1.845,0	0,006	2.115,8	0,004	2.235,9	0,007
Pabelan	1.956,3	0,000	2.202,1	0,000	2.433,9	0,000	2.760,1	0,019	2.931,1	0,055
Tuntang	1.746,1	0,023	1.792,6	0,012	2.012,8	0,016	2.286,6	0,016	2.451,1	0,016
Bayubiru	1.485,2	0,016	1.849,0	0,018	2.013,3	0,015	2.296,8	0,015	2.415,8	0,011
Jambu	1.312,5	0,041	1.494,3	0,028	1.644,5	0,029	1.866,5	0,030	1.973,1	0,031
Sumowono	1.874,3	0,033	2.188,0	0,054	2.345,7	0,047	2.673,3	0,015	2.802,0	0,013
Ambarawa	1.752,1	0,030	1.933,2	0,042	2.175,1	0,049	2.483,3	0,050	2.707,4	0,055
Bawen	1.418,1	0,028	1.319,7	0,055	1.449,8	0,018	1.644,3	0,057	1.759,2	0,055
Bringin	1.210,1	0,021	1.380,7	0,53	1.536,3	0,052	1.756,5	0,051	1.995,2	0,035
Bancak	**	**	**	**	**	**	**	**	1.694,4	0,042
Pringapus	1.234,3	0,049	1.203,5	0,020	1.305,0	0,021	1.482,1	0,067	1.552,4	0,067
Bergas	1.616,7	0,002	1.577,0	0,018	1.735,7	0,019	1.986,9	0,018	2.091,6	0,021
Ungaran	1.848,8	0,054	1.710,0	0,004	1.927,2	0,007	2.202,5	0,009	2.406,3	0,016
Rata-rata	1.489,5	0,023	1.530,7	0,055	1.778,8	0,022	2.024,8	0,027	2.273,7	0,029

Sumber: Dani, 2005 (diolah kembali)

Ket: *) Masih tergabung dengan Kecamatan Susukan

***) Masih tergabung dengan Kecamatan Bringin

pendapatan, artinya secara umum kinerja ekonomi dari sisi ini tetap baik.

Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah. Kinerja ekonomi daerah juga dapat dilihat dari upaya mengembangkan potensi ekonomi daerah yang dimilikinya. Berdasarkan pilihan strategi kebijakan Intanpari sebagai sektor unggulan daerah di Kabupaten Semarang, maka dapat dikaji kembali apakah pemilihan strategi kebijakan tersebut sudah dapat dianggap tepat sasaran atau belum. Untuk mengkaji persoalan ini dapat dilihat dari hasil analisis model *LQ* dan *Shift-share*. Jika hasil analisis *LQ* menunjukkan nilai yang lebih besar daripada satu, maka pilihan kebijakan Intanpari dapat dianggap sudah tepat.

Sebaliknya, jika nilai *LQ* dari sektor Intanpari menunjukkan kurang dari satu, maka pilihan kebijakan tersebut perlu dilihat ulang. Sedangkan, dengan model *Shift-share* untuk melihat apakah sektor Intanpari Di Kabupaten Semarang tersebut mampu tumbuh lebih cepat daripada sektor yang sama di Propinsi Jawa Tengah.

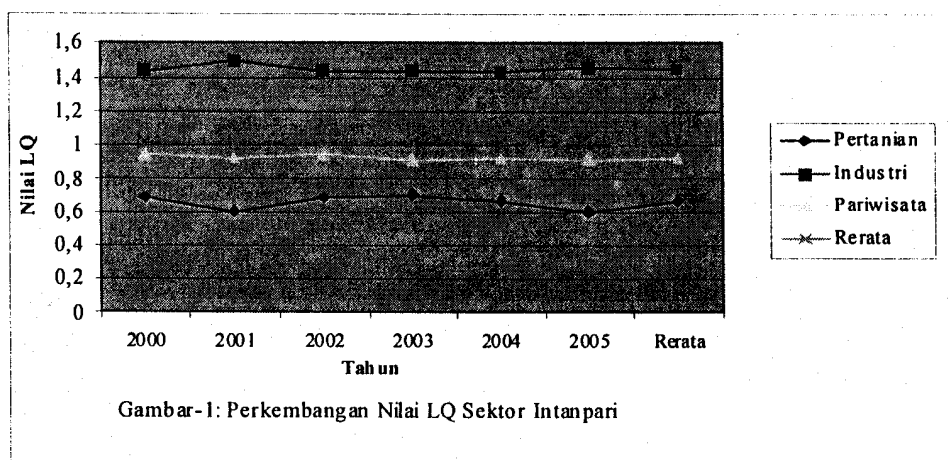
Hasil perhitungan *LQ* khusus untuk sektor Industri sebagai bagian dari sektor unggulan Intanpari selama periode tahun 2000 hingga tahun 2005, ternyata menunjukkan nilai angka rata-rata *LQ* di atas satu yaitu sebesar 1.4499, yang berarti sektor industri ini termasuk ke dalam sektor basis. Dengan kata lain, sektor industri

Tabel-5
Nilai Location Quotient (LQ) Sektoral Kabupaten Semarang
Tahun 2000-2005

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Rerata
Pertanian	0.6870	0.6019	0.6856	0.7022	0.6652	0.6037	0.6576
Pertambangan dan Galian	0.1254	0.1158	0.1107	0.1101	0.1165	0.1137	0.1153
Industri Pengolahan	1.4405	1.4991	1.4344	1.4363	1.4300	1.4590	1.4499
Listrik, Gas dan Air bersih	0.9580	1.0187	0.9235	1.0245	1.0262	0.9832	0.9890
Bangunan	0.7631	0.7514	0.7176	0.6695	0.6616	0.6809	0.7073
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.9914	1.0368	1.0195	1.0276	1.0449	1.0362	1.0261
Pengangkutan dan Komunikasi	0.3813	0.3782	0.3759	0.6127	0.4079	0.4255	0.4302
Keuangan, Persewaan & Jasa	0.8100	0.8072	0.8061	0.8195	0.9080	0.8887	0.8399
Jasa-jasa	0.8961	0.8096	0.8745	0.7928	0.8057	0.7909	0.8283
Rata-rata	0.7836	0.7798	0.7720	0.9945	0.7851	0.7758	0.7826

Sumber: Ayudya, 2007 (diolah kembali)

Gambar 3
Perkembangan Nilai LQ Sektor Intanpari



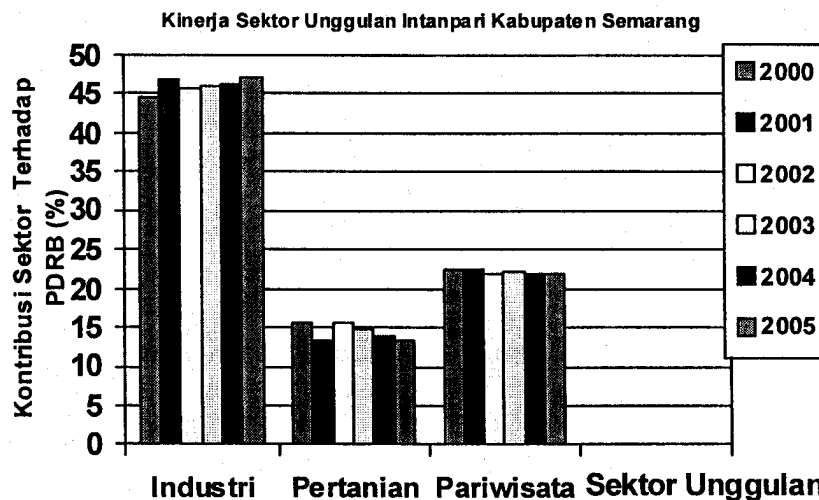
Gambar-1: Perkembangan Nilai LQ Sektor Intanpari

ini memiliki potensi ekspor. Artinya sektor industri tersebut mampu memenuhi kebutuhan ekonomi baik di dalam wilayah Kabupaten Semarang sendiri maupun kebutuhan untuk wilayah daerah di luar Kabupaten Semarang. Dengan demikian, kinerja ekonomi daerah yang menetapkan kebijakan pada sektor industri sebagai sektor unggulan adalah tepat dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

Tabel 5 dan Gambar 1 menunjukkan bahwa sektor Intanpari sebagai sektor unggulan daerah Kabupaten Semarang, masih perlu perjuangan keras. Karena untuk sektor pertanian dan sektor pariwisata masih memberikan nilai LQ kurang dari satu atau bukan sektor basis. Artinya, sektor ini belum potensial, dan hanya memenuhi kebutuhan di dalam daerah kabupaten itu sendiri, serta belum berpeluang ekspor.

Kontribusi Pengembangan Sektor Intanpari. Sesuai dengan tujuan dan metodologi penelitian ini, pengembangan sektor unggulan yang dianalisis di Kabupaten Semarang lebih difokuskan pada sektor Intanpari. Sektor Intanpari telah lama dijadikan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Semarang. Masalahnya adalah sampai sejauhmana kinerja ekonomi yang dilihat dari kontribusi sektor intanpari ini terhadap PDRB di Kabupaten Semarang. Pada dasarnya, sektor intanpari ini telah memberikan kontribusi positif terhadap PDRB. Barangkali, posisi strategis yang dimiliki oleh wilayah daerah Kabupaten Semarang merupakan anugerah yang dapat memberikan banyak keuntungan untuk daerah ini. Tingginya mobilitas arus masyarakat yang melalui daerah ikut memberikan kontribusi terhadap sektor Intanpari ini.

Gambar 4
Kontribusi Sektor Unggulan Intanpari Terhadap PDRB
Kabupaten Semarang



Tabel 6
Kontribusi Sektor Unggulan Intanpari Kabupaten Semarang

Tahun	Sektor Industri	Sektor Pertanian	Sektor Pariwisata	Jumlah
2000	44,82%	15,56%	22,53%	82,91%
2001	46,89%	13,38%	22,52%	82,79%
2002	45,69%	15,45%	21,79%	82,93%
2003	45,99%	14,76%	22,01%	82,76%
2004	46,33%	14,01%	21,85%	82,19%
2005	47,03%	13,34%	21,78%	82,15%
Rata-rata	46,13%	14,42%	22,08%	82,62%

Sumber: PDRB Kabupaten Semarang, 2006

Berdasarkan Tabel 6, tampak bahwa sekalipun kontribusi sektor Intanpari secara rata-rata masih cukup besar namun secara umum dari tahun 2000 hingga tahun 2005 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Berdasarkan Tabel 6 tampak bahwa kinerja ekonomi sektor industri mampu memberikan kontribusi yang terbesar, disusul oleh sektor pariwisata dan baru sektor pertanian. Sektor industri secara langsung kontribusinya cukup besar karena memang wilayah ini cukup banyak terdapat industri skala besar, menengah dan kecil. Sektor pariwisata kontribusinya secara tidak langsung cukup besar karena ditopang oleh sektor unggulan lain yakni sektor, perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan, sektor pertanian kontribusinya cenderung turun, karena semakin berkurangnya ladang untuk sektor pertanian, terutama pertanian sawah yang kini banyak berubah fungsi sebagai perumahan.

Berdasarkan Tabel 6 dan Gambar 4, tampak bahwa sektor intanpari telah berkontribusi 82,62% terhadap PDRB. Adapun sektor industri telah memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Kabupaten Semarang. Dengan demikian strategi pengembangan sektor intanpari yang dilakukan secara komprehensif dan saling mendukung adalah sudah tepat. Berdasarkan

hasil analisis SWOT, ditegaskan bahwa strategi pengembangan sektor ini masih dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih baik dengan melakukan berbagai upaya pengembangan komoditas dan produk serta jenis UMKM unggulan yang dimiliki tiap sektor yang bersangkutan. Artinya pengembangan jenis UMKM unggulan diyakini banyak memiliki *backward linkages* terhadap produk dari sektor pertanian serta memiliki *forward linkages* terhadap sektor pariwisata.

Selanjutnya, hasil perhitungan *Shift-share* pada Tabel 7 menunjukkan bahwa sektor industri masih tetap sebagai salah satu sektor unggulan utama di Kabupaten Semarang karena nilai komponen daya saing (DS_{ij}) positif dan telah memiliki kecenderungan yang meningkat. Selain itu, nilai indeks pertumbuhan totalnya juga menunjukkan nilai indeks positif dan tertinggi. Artinya, sektor industri ini mempunyai laju pertumbuhan yang lebih cepat daripada laju pertumbuhan sektor industri secara nasional. Dengan demikian, sektor industri ini dapat dianggap sebagai *leading sector* untuk perekonomian daerah Kabupaten Semarang.

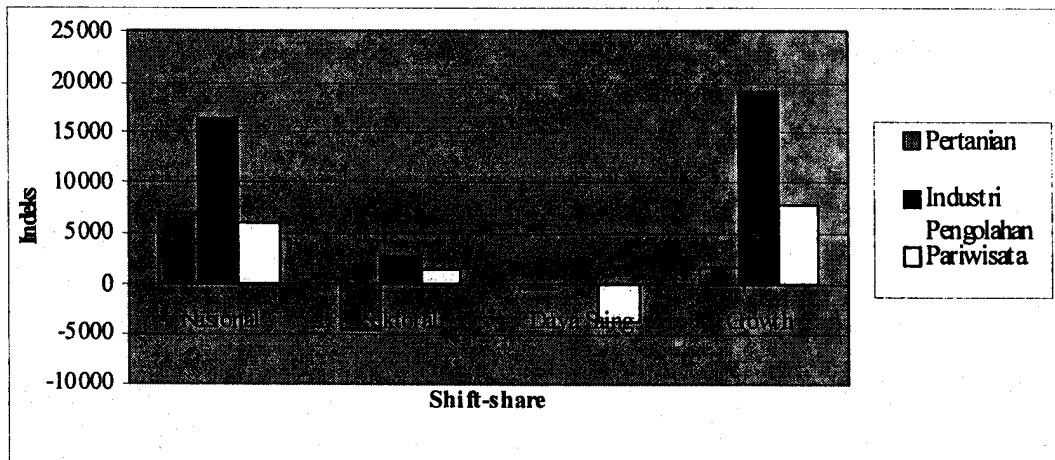
Di sisi lain, sektor pertanian justru menunjukkan pertumbuhan melambat daripada sektor yang sama di tingkat nasional. Hal ini

Tabel 7
Nilai Analisis *Shift-Share* Sektoral Di Daerah Kabupaten Semarang
(Periode tahun 1999-2003)

Lapangan Usaha	PR_{ij}	PS_i	DS_{ij}	$\Delta Q'_{ij}$
Pertanian	6912.04	-4697.19	-487.29	1727.56
Pertambangan dan Galian	71.73	26.81	-113.13	-14.59
Industri Pengolahan	16360.64	2593.09	7.72	18961.46
Listrik, Gas dan Air bersih	606.55	861.42	-215.40	1252.57
Bangunan	676.98	-107.59	-215.16	354.24
Perdagangan, Hotel dan Restoran	6937.05	-2398.57	-2398.58	7471.80
Pengangkutan dan Komunikasi	1136.93	506.79	506.79	2446.75
Keuangan, Persewaan & Jasa Persh.	1520.33	459.64	459.64	1502.55
Jasa-jasa	5159.68	5183.69	5183.69	8206.98
Jumlah	39381.93	2427.56	-7639.1	41909.32
Rata-rata	4375.77	269.73	-848.79	4656.59

Sumber: Mujib, 2005 (diolah kembali)

Gambar 5
Posisi Perubahan Struktur Ekonomi Daerah
Kabupaten Semarang



berarti produk yang dihasilkan sektor pertanian hanya untuk mencukupi kebutuhan lokal daerah Kabupaten Semarang saja. Sementara itu, sektor pariwisata yang komponennya merupakan derivatif dari sektor Perdagangan Hotel, Restoran dan sektor Jasa-jasa sedikit memberikan kecenderungan yang lebih baik daripada sektor pertanian. Walaupun sektor pariwisata juga memberikan tingkat pertumbuhan yang lebih besar daripada sektor yang sama di tingkat nasional, namun pertumbuhan ini masih belum dapat menjadi andalan sebagaimana sektor industri. Namun demikian, secara umum sektor Intanpari ini yang sangat ditopang oleh sektor industri, dan berdasarkan hasil *shift-share* masih dapat dikategorikan memiliki kinerja ekonomi yang baik sebagai pendorong sektor-sektor yang lainnya di wilayah daerah Kabupaten Semarang.

Berdasarkan Tabel 7 dan Gambar 5, tampak bahwa sektor Intanpari memang memiliki kinerja pertumbuhan yang baik, namun sayang sektor intanpari yang dimiliki oleh Kabupaten Semarang ini masih memiliki kinerja daya saing yang sangat rendah. Sekalipun pergeseran secara proporsional sektoral (*industri mix component*) bernilai positif, tetapi pergeseran daya saing daerah (*competitive effect component*) masih rendah bahkan DS_{ij} bernilai negatif. Artinya daya saing sektor industri di daerah Kabupaten Semarang sekalipun tingkat pertumbuhannya tinggi dan secara proposional pergeserannya

(PS_{ij}) positif yang berarti kinerja ini baik tetapi sektor ini tidak memiliki daya saing yang baik yang berarti kinerja daya saing sektor ini adalah rendah. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah Kabupaten Semarang harus berupaya keras untuk meningkatkan daya saing sektor yang menjadi unggulannya sehingga sektor ini mampu memiliki kinerja daya saing lokal maupun ekspor ke depan yang lebih baik. Argumentasi ini cukup beralasan karena nilai pangsa regional (*national growth component*) atau nilai PR_{ij} adalah cukup baik dan bernilai positif.

Dengan kata lain, sektor industri masih tetap memiliki nilai *shift* yang positif. Ini menunjukkan bahwa sektor industri cukup konsisten memiliki kinerja yang baik dalam mendorong kinerja perekonomian wilayah daerah Kabupaten Semarang. Sedangkan, sektor pertanian nilai *shift*-nya (pergeseran proposional sektoralnya negatif), menandakan bahwa sektor pertanian tidak kompetitif di tingkat nasional. Nilai *shift* (DS_{ij}) pada sektor pariwisata juga bernilai negatif, menandakan bahwa sektor pariwisata tidak memiliki kinerja daya saing yang baik.

Pola dan Struktur Ekonomi Daerah. Apabila fakta tingkat pertumbuhan ekonomi digabung secara sistematis dengan tingkat pendapatan perkapita (Tabel 2, 3, 4 dan 6), maka akan diperoleh gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Semarang. Pola dan struktur ini dapat digunakan untuk memperkirakan prospek

pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang. Selain itu, pola dan struktur ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan daerah. Berdasarkan teknik *Klassen Typology* sebagai dasar analisis, diperoleh diskripsi pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah sebagai berikut.

- 1). Kelompok I : Daerah yang maju dan tumbuh cepat (*rapid growth region*) yaitu suatu daerah yang nilai pendapatan per kapita dan laju pertumbuhannya lebih tinggi daripada pendapatan rata-rata dan laju pertumbuhan rata-rata. Dalam kelompok ini adalah daerah Pabelan, Ungaran dan Bergas.
- 2). Kelompok II : Daerah yang memiliki tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi dari rata-rata tetapi memiliki laju pertumbuhan yang lebih rendah dari rata-rata. Yang termasuk dalam kelompok

daerah ini adalah Amba-rawa, Bayubiru, Getasan, Susukan, Sumowono dan Tuntang.

- 3). Kelompok III : Daerah yang memiliki laju pertumbuhan lebih besar dari rata-rata tetapi memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dari rata-rata, yang termasuk dalam kelompok ini adalah daerah Bawen, Jambu, Suruh, dan Tenganan.
- 4). Kelompok IV : Daerah yang cenderung memiliki nilai pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan lebih rendah daripada tingkat pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan rata-rata, yang termasuk dalam kelompok ini adalah daerah Kaliwungu, Bancak, Bringin, dan Pringapus.

Tabel 8
Klasifikasi Daerah di Wilayah Kabupaten Semarang

Laju Pertumbuhan (g) PDRB Perkapita (y)	$y_i > y$	$y_i < y$
	$g_i > g$	$g_i < g$
$g_i > g$	Daerah Maju dan Tumbuh Cepat Pabelan, Ungaran dan Bergas	Daerah Berkembang Cepat Bawen, Jambu, Suruh, Tenganan
$g_i < g$	Daerah Maju Tapi Tertekan Ambarawa, Bayubiru, Getasan, Susukan, Sumowono & Tuntang	Daerah Relatif Tertinggal Kaliwungu, Bancak, Bringin, dan Pringapus

Sumber: Mujib, 2005; Dani, 2005; Ayudya, 2007 (diolah kembali)

Keterangan :

g_i adalah laju pertumbuhan PDRB pada kecamatan (i) di Kabupaten Semarang

g adalah laju pertumbuhan PDRB rata-rata Kabupaten Semarang

y_i adalah pendapatan per kapita kecamatan (i) di Kabupaten Semarang

y adalah pendapatan per kapita rata-rata Kabupaten Semarang

SIMPULAN

Secara umum dan relatif, kinerja ekonomi daerah Kabupaten Semarang selama periode pengamatan tahun 1999 hingga tahun 2005 adalah lebih baik dibanding rata-rata nasional di Propinsi Jawa Tengah. Dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan ke dalam wilayah daerah yang lebih kecil yakni pada tingkat kecamatan juga baik. Selain itu, tingkat pemerataan di wilayah Kabupaten Semarang dalam tiap tahunnya juga baik. Tingkat pertumbuhan masing-masing kecamatan banyak yang lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan rata-rata Kabupaten Semarang. Begitu juga tingkat pendapatan per kapita di tingkat kecamatan juga relatif lebih merata. Dengan kata lain, kinerja ekonomi daerah dilihat dari tingkat pemerataan adalah baik, karena nilai Indeks Williamsonnya baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten tidak ada yang lebih besar daripada 0,35.

Pilihan kebijakan pada strategi Intanpari secara relatif sudah tepat karena nilai indeks LQ dan Shift-share menunjukkan nilai yang positif dan lebih besar daripada satu. Artinya sektor Intanpari yang ditopang oleh sektor industri secara umum memiliki peluang ekspor yang baik dan memiliki nilai struktur perubahan ekonomi yang lebih cepat daripada nasional. Namun demikian, sektor intanpari ini masih memiliki kinerja daya saing yang rendah dan jika dilihat secara parsial dari sektor pertanian dan pariwisata tampaknya kinerja ekonomi sektor ini justru menunjukkan kecenderungan yang menurun. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa apabila masalah pilihan Intanpari masih akan digunakan sebagai pendukung utama program perencanaan pembangunan berikutnya, maka pemerintah harus berhati-hati dan harus memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk mengantisipasi daya saing dari daerah lain. Selain itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap komoditas dan produk serta jenis usaha terutama UMKM unggulan yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut di daerah ini terutama yang berasal dari sektor unggulan tersebut. Jika telah ditemukan KPJU (Komoditas, Produk dan

Jenis Usaha) unggulan di daerah ini diyakini akan lebih mampu untuk meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan lapangan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Ayudya. 2007. "Kontribusi Pembangunan Sektor Ekonomi Unggulan Terhadap PDRB Kabupaten Semarang". *Laporan Penelitian, tidak dipublikasikan*. Semarang : FE UNNES.
- Muljarijadi, Bagja. 2003. "Kinerja Ekonomi Wilayah Jawa Barat dan Banten". *Jurnal Ekonomi & Kewirausahaan*. Vol. II, No. 2 Juli. Bandung : ISEI.
- Wijayanto, Dani Yus. 2005. "Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang". *Laporan Penelitian, tidak dipublikasikan*. Semarang : FE UNNES.
- Bendavid-Val, Avrom. 1991. "*Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*". New York : Praeger Publishers.
- Hoover, M. And Giarrantani. 1984. "*An Itroduction to Regional Economics*". Third Edition. New York : Alfred A. Knopf.
- Arsyad, Lincolin. 1999. "*Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*". Yogyakarta : BPFE.
- Woyanti, Nenik. 2006. "Analisis Potensi Investasi di Kabupaten Blora". *Jurnal Ilmiah ASET*, Vol. 8. No.1, Semarang : STIE Widya Manggala.
- Saerofi, Mujib. 2005. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan pengembangan Sektor potensial di Kabupaten Semarang". Pendekatan Model Basis Ekonomi dan SWOT. *Laporan Penelitian, tidak dipublikasikan*. Semarang : FE UNNES.
- Soepono, Prasetyo. 1993. "Analisis Shift-Share Perkembangan dan Penerapan". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Yogyakarta : FE UGM.
- Soepono, Prasetyo. 2001. "Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (ekspor) Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-alat Analisis Regional". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Yogyakarta : FE UGM.
- Prasetyo, P. Eko. 2008. "Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kendal". *Laporan Penelitian, tidak Dipublikasikan*. Semarang: FE UNNES.
- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional; Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Ghalib, Rusli. 2005. *Ekonomi Regional*. Bandung : Pustaka Ramadhan.

Sjafrizal. 1997. "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat". *Prisma*. No. 3, Jakarta : LP3ES.

Tambunan, Tulus TH. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Widodo, Tri. 2006. "*Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer Era Otonomi Daerah*", Yogyakarta: UPP STIM YKPN.